



**MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 450/KPTS/M/2017

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang salah satunya meliputi daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu dilakukan klasifikasi informasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu dilakukan pemutakhiran secara berkala terhadap Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

- d. bahwa Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No.391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga perlu diganti dengan Keputusan Menteri yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Daftar Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);

3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang Perubataan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 446);

4. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Menetapkan daftar informasi yang wajib disediakan dan diumumkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, meliputi:

- a. Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala;
- b. Informasi Publik yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta; dan
- c. Informasi Publik yang Wajib Tersedia Setiap Saat.

KEDUA : Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Daftar Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi setiap unit kerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 391/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Klasifikasi Informasi di Kementerian Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Juli 2017

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 450/KPTS/M/2017
TENTANG
DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN
DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN/ INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
UMUM								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	Seluruh Unit organisasi	Profil Unit Kerja	Seluruh unit eselon II	Seluruh unit eselon II	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	5 tahun	Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 20 Tahun 2016
2.	Seluruh Unit organisasi	Daftar Pejabat Struktural dan/ atau fungsional	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Biro Kepegawaian/ Bagian Kepegawaian masing-masing unit organisasi	Setiap ada perubahan, di Jakarta	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	1 tahun	
3.	Seluruh Unit organisasi	Informasi umum pengadaan barang dan jasa (<i>E-Procurement</i>)	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Setiap tahun	<i>Softcopy</i> dan <i>Hardcopy</i>	2 tahun	
4.	Seluruh Unit organisasi	Pengumuman Pelelangan Barang dan Jasa	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Seluruh unit eselon II/ satuan kerja	Berkala/ setiap tahun, Jakarta	<i>Softcopy</i>	2 tahun	
5.	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan Laporan Keuangan Kementerian (Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Kementerian <i>Audited</i>)	Sekretariat Jenderal	Biro Keuangan Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	<i>Softcopy</i>	5 tahun	
6.	Seluruh Unit organisasi	Ringkasan laporan akses (pelayanan) informasi publik	Biro Komunikasi Publik dan unit PPID	Biro Komunikasi Publik dan unit	Setiap enam bulan sekali, di	<i>Softcopy</i> /	2 tahun	

[illegible]

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUJAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang kerusakan infrastruktur PUPR akibat bencana alam	Masing-masing unit organisasi (Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan)	Masing-masing unit organisasi (Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan)	Apabila terjadi bencana alam	<i>Hardcopy</i>	1 tahun	
16.	Seluruh Unit organisasi	Informasi tentang rencana gangguan fungsional terhadap utilitas publik	Masing-masing unit organisasi (Ditjen SDA, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan)	Masing-masing unit organisasi (Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan)	Apabila sudah ada rencana gangguan terhadap utilitas publik	<i>Hardcopy</i>	Selama terjadinya gangguan tersebut	
17.	Seluruh Unit organisasi	Informasi progress tanggap darurat bencana	Masing-masing unit organisasi (Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan)	Masing-masing unit organisasi (Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan)	Terjadi bencana alam	<i>Hardcopy</i>	1 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
I. SEKRETARIAT JENDERAL								
Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan SECARA BERKALA								
1.	SEKRETARIAT JENDERAL	Rekapitulasi informasi realisasi fisik dan keuangan per unit organisasi	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal	Setiap triwulan, di Jakarta	Softcopy/ hardcopy	2 tahun	
2.		Ringkasan RKAKL dan DIPA Kementerian PUPR	Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan Anggaran dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy/ hardcopy	2 tahun	
3.		Daftar Rancangan Produk Hukum Kementerian PUPR	Biro Hukum	Biro Hukum	Setiap ada penambahan produk hukum, di Jakarta	Hardcopy dan/softcopy	1 tahun	
4.		Produk hukum Kementerian PUPR	Biro Hukum	Biro Hukum	Setiap ada penambahan produk hukum, di Jakarta	Hardcopy dan/softcopy	5 tahun	
5.		Rencana penerimaan calon pegawai	Biro Kepegawaian	Biro Kepegawaian	Jakarta	Dokumen	2 tahun	
6.		Tata cara memperoleh informasi publik, mengajukan keberatan serta proses penyelesaian sengketa informasi	Sekretariat Jenderal	Biro Komunikasi Publik	Jakarta	Dokumen	5 tahun	
7.		Renja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kementerian PUPR	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Sekretariat Jenderal	Biro Perencanaan Anggaran dan KLN Sekretariat Jenderal	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy dan hardcopy	2 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
	Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT							
8.	SEKRETARIAT JENDERAL	Peta Infrastruktur Indonesia periode tahun 2008 – 2016 : Peta infrastruktur hasil pembangunan yang dilaksanakan oleh Kem. PUPR dari tahun 2008-2016 terdiri dari bidang SDA, BM, CK	Pusdatin	Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur	2008-2014 di Jakarta	softcopy	10 Tahun	
9.	SEKRETARIAT JENDERAL	Peta rencana pembangunan bendungan 2015 -2019 : peta rencana pembangunan bendungan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2015 – 2019	Pusdatin	Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur	2008-2016 di Jakarta	softcopy	10 Tahun	
10.	SEKRETARIAT JENDERAL	Peta Rupa Bumi Indonesia : Peta RBI Skala 1:250.000; a. Skala 1 : 25.000 b. Skala 1 : 50.000	Pusdatin	Badan Informasi Geospasial	2013-2016 Cibinong	softcopy	10 Tahun	
11.		Citra Satelit : Citra Satelit dengan berbagai format wilayah Indonesia tahun 2010-2016	Pusdatin	LAPAN	2010-2016	softcopy	25 Tahun	
12.		Buku Informasi Statistik 2011-2016 : Buku yang memuat data dan informasi statistik infrastruktur Pekerjaan Umum dan disajikan dalam bentuk tabular, grafik/diagram; dan hasil analisis data menurut Bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan data gender	Pusdatin	Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur	tiap tahun, Jakarta	softcopy dan hardcopy	10 Tahun	
13.		Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air : Berisikan informasi geospasial infrastruktur Bidang Sumber Daya Air yang terdiri atas: a. Bendungan; b. Bendung; c. Embung; d. Stasiun Klimatologi; e. Stasiun Hujan; f. Pos Duga Air; g. Saluran Banjir/Kanal; h. Sungai; i. Daerah Pengembangan Rawa; j. Daerah Irigasi (Daerah irigasi di atas 3000 Ha) k. Danau; l. Setu m. Waduk n. Daerah Aliran Sungai o. Wilayah Sungai	Pusdatin	Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur	setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	20 tahun	Sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/II/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.		Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Bina Marga : yang terdiri atas: a. Jaringan Jalan Tol b. Rencana Jaringan Jalan Tol c. Jaringan Jalan Nasional • Jalan Arteri • Jalan Kolektor 1 • Sebaran Alat Berat	Pusdatin	Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur	setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun	
15.		Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Cipta Karya : Berisikan informasi geospasial Infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terdiri atas: a. Sistem Penyediaan Air Minum (IPA) b. Sistem Pelayanan Air Limbah (IPAL, IPLT) c. Sistem Pelayanan Persampahan (TPA)	Pusdatin	Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur	setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	20 Tahun	
16.		Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Perumahan Rakyat : Berisikan informasi geospasial Infrastruktur Bidang Perumahan Rakyat yang terdiri atas Rusunawa	Pusdatin	Balai Pemetaan dan Informasi Infrastruktur	setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	20 tahun	Sesuai Lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Data dan Informasi Geospasial Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
17.		Informasi Geospasial Proyek Strategis Berisikan informasi geospasial proyek strategis yang terdiri atas: a. Proyek Strategis Sumber Daya Air b. Proyek Strategis Bina Marga c. Proyek Strategis Cipta Karya	Pusdatin	Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi	setiap tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	20 tahun	
18.		Buku Profil Infrastruktur Pekerjaan Umum 2011-2016 : Buku yang menyajikan data dan informasi teknis prasarana dan sarana bidang ke-PU-an beserta data-data pendukung lainnya yang terkait dengan kegiatan ke-PU-an dalam 1 propinsi	Pusdatin	Bidang Integrasi Data dan Layanan Teknologi Informasi	2014 atau 2015, Jakarta	softcopy dan hardcopy	10 Tahun	
19.		Informasi umum tentang Unit PNPB dan BLU di lingkungan Kementerian PUPR	Biro Keuangan	Biro Keuangan	Jakarta	Dokumen	5 tahun/ selama berlaku	
20.		Daftar informasi publik	Sekretariat Setjen	Biro Komunikasi Publik	Jakarta	Dokumen	5 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)	Prosedur Pengaduan Masyarakat	Sekretariat Itjen	Itjen	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	
Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT								
2.	INSPEKTORAT JENDERAL (ITJEN)	Rekapitulasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (jumlah pelanggaran, gambaran umum pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal dan ringkasan laporan penindakan terhadap pelanggaran)	Sekretariat Itjen	Itjen	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	
3.		Rekapitulasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat serta tindak lanjut laporan)	Sekretariat Itjen	Itjen	Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	
4.		Rekapitulasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara	Bagian Hukum dan Komunikasi Publik (Sekretariat Itjen)	Itjen	Jakarta	Dokumen	5 tahun	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
III. DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)	Daftar prasarana dan sarana Sumber Daya Air tahunan	BALAI-Direktorat/ Pusat Pembina	BALAI	Daerah/ masing-masing Balai	Dokumen	5 tahun	
2.		Buku Kinerja SDA	Ditjen	Direktorat PUSDA	Pusat	Dokumen	5 tahun	
3.		Daftar pola dan rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai yang telah disahkan	BALAI – Direktorat Pembina	BALAI/ Direktorat BPSDA	Daerah/ masing-masing Balai	Dokumen	20 tahun	
4.		Daftar wadah koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai	BALAI	BALAI	Daerah/ masing-masing Balai	Dokumen	5 tahun	
Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT								
5.	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR (DITJEN SDA)	Daftar prasarana dan sarana Sumber Daya Air	BALAI – Direktorat /Pusat Pembina	BALAI- Direktorat /Pusat Pembina	Daerah/Jakarta	Dokumen	5 tahun	
6.		Program-program prioritas Ditjen SDA	Dit. Pengembangan Jaringan SDA	Direktorat/Pusat	Jakarta	Dokumen	5 tahun	
7.		Daftar tinggi muka air waduk	BALAI-Direktorat Bina OP	BALAI-Direktorat Bina OP	Daerah/Jakarta	Dokumen	5 tahun	
8.		Peta kawasan kekeringan	Dit. Bina OP	BNPB	Daerah/Jakarta	Dokumen	5 tahun	
Informasi yang Wajib Diumumkan Secara SERTA MERTA								
9.		Peta kawasan rawan bencana banjir	Dit. Bina OP	BNPB	Jakarta	Dokumen	5 tahun	
10.		Laporan kejadian bencana (tanah longsor, banjir, tsunami, gunung meletus, gempa bumi)	Dit. Bina OP	Dit. Bina OP	Jakarta	Dokumen	5 tahun	

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
IV. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	Informasi Umum Kondisi Jalan	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	Subdit Analisa Data dan Pengembangan Sistem	Jakarta	Dokumen Elektronik	1 tahun	
2.		Program-program prioritas Dijen Bina Marga	Direktorat Pengembangan Jaringan Jalan	Subdit Keterpaduan Perencanaan dan Sistem Jaringan	Jakarta	Dokumen	5 tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
3.		Pedoman Spesifikasi dan standar jalan/jembatan	Direktorat Pembangunan Jalan	Kasubdit Standar dan Pedoman	Jakarta	Dokumen	5 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
V. DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	Laporan Pasca Bencana	Satker Tanggap Darurat Permukiman	Satker Tanggap Darurat Permukiman	Jakarta	Laporan	1 tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
2.	DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA	Data <i>Sustainable Development Goals</i>	Sektoral Bidang Cipta Karya	Pemerintah Pusat	Jakarta	Laporan	1 tahun	
Informasi yang wajib Diumumkan SECARA SERTA MERTA								
3.		Daftar Daerah Rawan Bencana	Satker Tanggap Darurat Permukiman	BNPB dan BMKG	Jakarta	Hardcopy dan Softcopy	1 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
VI. DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN								
	Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA							
1.	DIREKTORAT JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN	Mekanisme Permohonan Bantuan Rumah Swadaya	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit. Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	2015, Jakarta	Dokumen Elektronik	5 tahun	
2.		Buku Saku dan Panduan Teknis Konstruksi Rumah	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit. Fasilitas Pemberdayaan dan Kemitraan	2015, Jakarta	Dokumen	5 tahun	
3.		SOP Direktorat Rumah Susun terdiri dari: a. SOP Pengajuan Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun b. SOP Pelaksanaan Verifikasi Usulan Bantuan Pembangunan Rumah Susun c. SOP Serah Terima Aset Rumah Susun Terbangun	Direktorat Rumah Susun Direktorat Rumah Susun Direktorat Rumah Susun	Subdit. Perencanaan Teknik Subdit. Perencanaan Teknik Subdit. Penghuni dan Pengelolaan	Jakarta Jakarta Jakarta	Dokumen Dokumen Dokumen	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	
4.		Profil Penyediaan Perumahan per Provinsi	Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan	Subdit Data dan Informasi	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
5.		Data Teknis Rumah Swadaya (Nama Penerima, Alamat, Jumlah Bantuan)	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit. Fasilitas Pendataan dan Verifikasi	2015, Jakarta	Dokumen	5 tahun	
6.		Modul Pemberdayaan Masyarakat Bidang Perumahan Swadaya	Direktorat Rumah Swadaya	Subdit. Fasilitas Pemberdayaan dan Kemitraan	2015, Jakarta	Dokumen	5 tahun	
7.		SOP Direktorat Rumah Susun: a. SOP Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Rumah Susun	Direktorat Rumah Susun	Subdit Penyediaan	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		b. SOP Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan Rumah Susun	Direktorat Rumah Susun	Subdit Pemantauan dan Evaluasi	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
8.		Tipologi Rumah Susun	Direktorat Rumah Susun	Subdit Standar dan Pedoman	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
9.		SOP Penutakhiran Data Internal	Direktorat Perencanaan Penyediaan Perumahan	Subdit Data dan Informasi	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
10.		SOP Direktorat Rumah Umum dan Komersil: a. SOP Verifikasi Pra Konstruksi Usulan Bantuan PSU Perumahan Umum b. SOP Kegiatan Movev Bantuan PSU untuk Perumahan Umum c. SOP Pemantauan Pembangunan Rumah Tunggal, Rumah Deret, Rumah Susun Umum dan Komersial d. SOP Pendataan Lahan untuk Perumahan	Direktorat Rumah Umum dan Komersil Direktorat Rumah Umum dan Komersil Direktorat Rumah Umum dan Komersil Direktorat Rumah Umum dan Komersil	Subdit Perencanaan Teknis dan Evaluasi Subdit Fasilitas Bantuan Rumah Umum Subdit Fasilitas Bantuan Rumah Umum Subdit Fasilitas Bantuan Rumah Umum	Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta	Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	
11.		Lokasi Bantuan PSU Rumah Umum (setelah penetapan lokasi)	Direktorat Rumah Umum dan Komersial	Subdit Fasilitas bantuan Rumah Umum	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
VII. DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN PERUMAHAN	Informasi Umum Mekanisme Bantuan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan	Subdit Pelaporan dan Perencanaan	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
2.		Gambaran Umum Pelaksanaan Program Bantuan Pembiayaan Perumahan Melalui KPR FLPP di Setiap Provinsi	Direktorat Evaluasi Pembiayaan Perumahan	Subdit wilayah I,II,III,IV	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
3.		Informasi Pelaksanaan Bantuan Teknik Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan (kebijakan dan program Sejuta Rumah, KPR FLPP, Bapertarum PNS, Subsidi Selisih Bunga/Margin, Subsidi Bantuan Uang Muka, dll)	Bina Sistem Pembiayaan Perumahan	Subdit Wilayah I, II, III	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
4.		Bahan Bantuan Teknik Pembinaan Sistem Pembiayaan Perumahan (materi kegiatan pelaksanaan bantuan teknik pembinaan sistem pembiayaan perumahan)	Direktorat Bina Sistem Pembiayaan Perumahan	Subdit Perencanaan dan Pelaporan	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETAP SAAT								
5.		Data Realisasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan	PDPPP dan Subdit Data dan Informasi Direktorat Perencanaan Pembiayaan Perumahan	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
6.		Data Realisasi Subsidi Bantuan Uang Muka, Subsidi Bantuan Pembiayaan Perumahan	Direktorat Pola Pembiayaan Perumahan	Satker Ditjen Pembiayaan Perumahan	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	
7.		Data Realisasi Bantuan Bapertarum PNS dan Pengembalian Tabungan PNS	Direktorat Layanan	Divisi Layanan	Jakarta	Dokumen	5 Tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
VIII. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG)								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.		Daftar Diseminasi/Sosialisasi Standar dan Pedoman yang Akan Dilaksanakan	Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerjasama Standar dan Kerjasama (untuk Pusat-Pusat Litbang)	Balitbang Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
2.		Daftar Rekapitulasi dan Ringkasan Laporan Advise Teknis/ <i>Home Doctor</i> dan Alih Teknologi	Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerjasama Standar dan Kerjasama (untuk Pusat-Pusat Litbang)	Balitbang Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
3.		Daftar dan Abstrak, Standar Pedoman dan Manual (SPM)	Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerjasama	Balitbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
4.		Ringkasan Hasil Litbang (yang telah dipublikasikan melalui katalog produk sampai tahun 2015)	Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerjasama Standar dan Kerjasama (untuk yang di Pusat-Pusat Litbang)	Balitbang Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.		Daftar dan Abstrak Teknologi yang Telah Diterapkan	Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerjasama Standar dan Kerjasama (untuk Pusat-Pusat Litbang)	Balitbang Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
6.		Daftar dan prosedur permintaan layanan uji laboratorium	Unit PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
	Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT							
7.	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BALITBANG)	Data dan Dokumentasi Hasil Litbang (brosur, katalog, booklet, dan buku)	Bagian Administrasi Standardisasi, Hukum dan Kerjasama/ Bagian Keuangan dan Umum	Balitbang Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
8.		Aplikasi/ Sistem Informasi Hasil Litbang	Standar dan Kerjasama/ Program dan Evaluasi/Kajian Kebijakan dan Kerjasama (K3)	Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
9.		Daftar Produsen yang Telah Memiliki Sertifikat IPA/IPAL, Kinerja Jaringan Irigasi, Kinerja Pos Duga Air, dan Kinerja Bangunan IPAL	Bagian Keuangan dan Umum/ Sumber Daya Kelibangan	Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
10.		Daftar Nama Konsumen dan Jenis Layanan Uji Laboratorium yang Telah Dilakukan	Sumber Daya Kelibangan dan Balai terkait	Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	
			Unit PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	Pusat-Pusat Litbang	Setiap tahun, Jakarta dan Bandung	softfile/ hardcopy	5 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KEY/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
IX. DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI								
Informasi yang wajib Disajikan dan Diumumkan SECARA BERKALA Daftar Simpul Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBUS) / Public Private Partnership di bidang PUPR yang telah atau sedang dilakukan								
1.	DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI		Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
2.		Buku konstruksi Indonesia 2011, 2012, 2013 dan 2014	Ditjen Bina Konstruksi	Bagian Tata Usaha	2011 dan 2014 di Jakarta	Hardcopy (buku)	5 tahun	
3.		Daftar Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap 5 Tahun di Jakarta	Hardcopy (buku), dan Softcopy	5 tahun	(SKKNI) yaitu rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek Pengetahuan (<i>knowledge</i>), Keterampilan dan/atau Keahlian (<i>skills</i>) serta Sikap kerja (<i>attitude</i>) yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal SKKNI yang dimaksud adalah yang telah disusun,

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								disahkan, dan dikeluarkan oleh Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
4.		Data Pasar Infrastruktur Dalam dan Luar Negeri	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Setiap Tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Data terkait proyek Infrastruktur dalam atau luar negeri dari sisi nilai pembiayaan atau investasi modal baik dari anggaran pemerintah maupun non pemerintah dengan tujuan sebagai informasi oleh berbagai pihak pemangku kepentingan di sektor konstruksi/

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUJAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								untuk menjadi rujukan/landasan dalam menganalisa pengambilan kebijakan
5.		Data Potensi Pasar Dalam dan Luar Negeri	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Data potensi terkait proyek infrastruktur dalam atau luar negeri dari sisi nilai pembiayaan atau investasi modal baik dari anggaran pemerintah maupun non pemerintah/ untuk menarik minat investor
6.		Dokumen Public Private Partnership Book, dokumen yang berisikan daftar proyek investasi infrastruktur yang dikelompokkan dalam tiga (3) kategori : 1) potensial project 2) perspektif project 3)ready for over project (siap ditawarkan)	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
7.		Daftar Proyek Prioritas	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah daerah dan atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan daerah yang memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah terkait kewenangan sesuai ketentuan PerUndang-undangan

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.		Data Proyek bidang PUPR yang sudah menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Setiap Tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
9.		Data Penilaian yang telah disahkan dan dikeluarkan oleh tim Juni Penghargaan Karya Konstruksi Indonesia, dalam rangka Pelaksanaan kegiatan Konstruksi Indonesia	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Setiap dua Tahun di Jakarta	Softcopy	2 Tahun	
10.		Data Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang dikeluarkan oleh Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
11.		Tanda Daftar Usaha Perseroan	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap Tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	yaitu ijin yang diberikan untuk melakukan pekerjaan konstruksi secara perseroan
12.		Penanaman Modal Asing yang telah disetujui untuk dilakukan pada proyek bidang PUPR	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap Tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
13.		Data Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Nasional dan Asing yang telah memiliki Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap Tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
14.		Norma Standar Pedoman Kriteria (NSPK) yang telah disusun, disahkan, dan dikeluarkan oleh : a. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur b. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi c. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi d. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
15.		Data Register Mutual Recognition Arrangement (MRA), terdiri	Direktorat Bina	Direktorat Bina	Setiap tahun di	Softcopy	1 Tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUJAI INFORMASI	UNIT PEMBUJATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		dari data lengkap asilek dan insinyur Indonesia yang telah terdaftar penyetaaraan di lingkup ASEAN	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Jakarta			
16		Data Kerjasama Dengan Mitra Kerja dalam bidang Pelatihan dan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
17		Data Penyusunan Profil Wilayah berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan akan Pelatihan dan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
18		Data Pemantauan Kegiatan Pelatihan tenaga kerja konstruksi (seluruh Indonesia)	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Setiap tahun di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi DJBK	Softcopy	1 Tahun	
Informasi yang wajib Tersedia SETIAP SAAT								
19		Materi Kompetensi atau materi yang digunakan untuk melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan untuk menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
20		Informasi terkait Pelatihan dan Sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Balai Jasa Konstruksi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Wilayah Balai Jasa Konstruksi DJBK	Softcopy	5 tahun	
21		Data penyerahan dan pemanfaatan MTU (Mobile Training Unit)	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Setiap tahun di Jakarta	Softcopy dan hardcopy	5 tahun	Kepada Pemerintah Daerah atau stakeholders konstruksinya
22		Data Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUKA) yang meliputi antara lain :kepala perwakilan, alamat luar negeri dan alaman di Indonesia, telp/fax dan masa berlakunya ijin	Direktorat Bina Kelengkapan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelengkapan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Website www.jasakonstruksi.net setiap tahun	Softcopy	5 tahun	
23		Daftar jumlah penanggungjawab teknis Badan Usaha Jasa	Direktorat Bina	Direktorat Bina	Website	Softcopy	5 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Konstruksi kualifikasi kecil yang telah mengikuti kegiatan pemberdayaan tingkat provinsi	Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	www.jasakonstruksi.net , setiap tahun			
24		Daftar trainer bersertifikat yang telah mengikuti kegiatan Training of Trainers (ToT)	Direktorat Kerjasama dan Pemberdayaan	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	5 tahun	
25		Data Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Penanaman Modal Asing	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Website www.jasakonstruksi.net , setiap tahun	Softcopy	5 tahun	
26		Informasi hasil kinerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Hardcopy	5 tahun	
27		Data investor local dan investor luar negeri yang terlibat dalam proyek kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) / Public Private Partnership di bidang PUPR	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
28		Data Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) nasional yang mengerjakan proyek di luar negeri	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
29		Daftar Standar Biaya Unum Provinsi, Kabupaten/kota	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	LPJK	Setiap tahun, menyesuaikan (provinsi) nya	Softcopy	1 Tahun	Terdapat di website Sistem Informasi Pendaftaran dan Pelaksanaan Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net Standar biaya untuk harga perkiraan sendiri di tingkat Provinsi Kabupaten/kota

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30		Daftar Informasi Progres Paket Pekerjaan Proyek Konstruksi di tingkat Provinsi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Tim Pembina Jasa Konstruksi di masing-masing Provinsi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Terdapat di website Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net
31		Data Tim Pembina Jasa Konstruksi di tingkat Provinsi, yang ditetapkan melalui SK Gubernur	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Tim Pembina Jasa Konstruksi di masing-masing Provinsi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Terdapat di website Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net
32		Data Tim Pembina Jasa Konstruksi di tingkat Kabupaten/Kota, yang ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Tim Pembina Jasa Konstruksi di masing-masing Pemerintah Kota/ Kabupaten	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Terdapat di website Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net
33		Daftar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jasa Konstruksi, ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh warga secara minimal	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Terdapat di website Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net
34		Daftar Mitra Usaha Jasa Konstruksi, adalah data terkait stakeholders yang berhubungan dengan pembinaan sektor konstruksi (seperti LPJUK, Asosiasi, BNSP, dan seterusnya)	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Terdapat di website Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Konstruksi	Konstruksi				Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net
35		Daftar Jaminan Usaha dalam Proyek Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	Terdapat di website Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) : www.jasakonstruksi.net Jaminan garansi dari bank atau konsorsium asuransi
36		Daftar Informasi Lean Construction yang terdiri dari TKDN (Tingkat Kandungan Dalam Negeri), Balai Teknologi, Pemilihan teknologi, Perhitungan	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
37		Data monitoring kesesuaian penerapan kompetensi pada lembaga pelatihan konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
38		Daftar Asosiasi profesi di Indonesia yang melaksanakan CPD (Continous Professional Development)	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
39		Data Capaian Kinerja Pembinaan Tenaga Kerja Konstruksi, baik di Pusat maupun daerah	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40		Data Monitoring penerapan Continuing Professional Development (CPD)	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
41		Daftar tenaga ahli yang teregistrasi pada Foreign Professional Engineer	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
42		Daftar Modul Pelatihan Konstruksi yang akan dipergunakan pada Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi sesuai spesifikasi yang diperlukan	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi	Setiap tahun, di Jakarta	Softcopy	1 Tahun	
43		Daftar pelatihan tenaga kerja konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Sesuai wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Dijen Bina Konstruksi, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	
44		Daftar instruktur pelatihan tenaga kerja konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Balai Jasa Konstruksi	Sesuai wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Dijen Bina Konstruksi, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	
45		Rasio Kapitalisasi atau Nilai pembiayaan dari investor dibandingkan dengan kebutuhan dana proyek infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	sebagai bagian dari pertimbangan Perusahaan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) di bidang PUPR
46		Data Pemetaan Resiko Investasi	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	adaah data yang menyajikan penyebaran hasil

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								identifikasi, analisis, serta penilaian terhadap resiko investasi khususnya dalam sektor Infrastruktur agar dapat dijadikan sebagai informasi bagi Badan Usaha dalam memahami resiko investasi Infrastruktur yang spesifik untuk masing-masing daerah atau jenis Infrastruktur
47		Informasi persyaratan untuk sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi dan tenaga kerja konstruksi	Direktorat Bina Kelengkapan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Investasi Infrastruktur	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	
48		Daftar Pemenang Lelang di bidang PUPR (Nilai Pekerjaan >100 M	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Kelengkapan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	
49		Daftar Instruktur SMM (Sistem Manajemen Mutu) di bidang PUPR	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	
50		Daftar Instruktur K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) di bidang PUPR	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	
51		Daftar petugas/pengawas K3 (Keamanan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja) di bidang PUPR	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	
52		Daftar Konstruksi Berkelanjutan, yang terkait dengan penerimgkatan proyek atau daerah yang telah memenuhi prinsip konstruksi berkelanjutan	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Jakarta, 1 tahun	Softcopy	1 Tahun	sebagaimana tertuang dalam Permen PUPR no.

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								05/PRT/M/2015 tentang Pedoman Umum Implementasi Konstruksi Berkelanjutan Pada Penyelenggaraan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum Dan Pemukiman

HNO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIM- PANAN	KET/ KODE
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
X.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BPSDM)							
	Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA Daftar informasi diklat (ada di kalender diklat / lampiran)							
1.	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		1. Sekretariat BPSDM 2. Pusdiklat SDA & Konstruksi (Pusat 2) 3. Pusdiklat Jalan, Perumahan Permukiman & PIW (Pusat 3) 4. Pusdiklat Manajemen & Pengembangan Jabatan Fungsional (Pusat 4)	1. Sekretariat BPSDM 2. Pusdiklat SDA & Konstruksi (Pusat 2) 3. Pusdiklat Jalan, Perumahan Permukiman & PIW (Jalan 3) 4. Pusdiklat Manajemen & Pengembangan Jabatan Fungsional (Pusat 4)	Jakarta & Bandung Januari	Hardcopy/ softcopy	1 tahun	
2.		Jadwal pelaksanaan Diklat	1. Sekretariat BPSDM 2. Pusdiklat SDA & Konstruksi (Pusat 2) 3. Pusdiklat Jalan, Perumahan Permukiman & PIW (Pusat 3) 4. Pusdiklat Manajemen & Pengembangan Jabatan Fungsional (Pusat 4)	1. Sekretariat BPSDM 2. Pusdiklat SDA & Konstruksi (Pusat 2) 3. Pusdiklat Jalan, Perumahan Permukiman & PIW (Pusat 3) 4. Pusdiklat Manajemen & Pengembangan Jabatan Fungsional (Pusat 4)	Jakarta & Bandung Januari	Hardcopy/ softcopy	1 tahun	
3.		Pendaftaran Seleksi Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Kedinasan dan Vokasi Kementerian PUPR	Sekretariat BPSDM	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Jakarta Februari - Maret	Hardcopy/ softcopy	1 tahun	
4.		Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi dan Pemanggilan Peserta Ujian Tertulis Calon Penerima Beasiswa Pendidikan Kedinasan dan Vokasi Kementerian PUPR	Sekretariat BPSDM	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Jakarta Maret - April	Dokumen hardcopy/so ftcopy	1 tahun	

HNO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUJAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.		Pengumuman Penerima Beasiswa Pendidikan Kedisnasan dan Vokasi Kementerian PUPR	Sekretariat BPSPDM	Bagian Perencanaan dan Evaluasi	Jakarta April - Mei	Dokumen <i>hardcopy/so ftcopy</i>	1 tahun	
6.		Jadwal <i>Assesment</i> (Penilaian Kompetensi)	1. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja 2. Balai Penilaian Kompetensi	Balai Penilaian Kompetensi	Jakarta Desember	Dokumen <i>hardcopy/so ftcopy</i>	1 tahun	
Informasi yang wajib tersedia SETIAP SAAT								
7.		Hasil penyusunan modul dan kurikulum Diklat Bidang PUPR Materi dalam modul (DIP) dibuat oleh Tim Penyusun Modul dan menjadi hak milik BPSPDM (Pusdiklat), sedangkan Materi dalam DIK adalah milik pengajar (Widyaiswara) yang terkait dengan hak karya intelektual Rekap jumlah peserta untuk setiap jenis diklat	Bidang Teknik dan Materi Pusdiklat 2,3, dan 4	Subbid Materi Pelatihan, Bidang Teknik & Materi Pusdiklat 2, 3, dan 4	Jakarta & Bandung	Dokumen <i>hardcopy/so ftcopy</i>	1 tahun	
8.			1. Sekretariat BPSPDM 2. Bidang Evaluasi & Pelaporan Pusdiklat	Subbid Evaluasi, Bidang Evaluasi & Pelaporan Pusdiklat	Jakarta & Bandung	Dokumen <i>hardcopy/so ftcopy</i>	1 tahun	
9.		Jumlah ASN yang telah dinilai kompetensinya	1. Pusat Penilaian Kompetensi dan Pemantauan Kinerja 2. Balai Penilaian Kompetensi	Balai Penilaian Kompetensi	Jakarta	Dokumen <i>hardcopy/so ftcopy</i>	1 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
XI. BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)								
Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA								
1.	BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)	Profil 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)	Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	Jakarta, 2015	Hardcopy	5 tahun	
2.		Rencana Strategis Kementerian PUPR	Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	Jakarta, 2015	Hardcopy dan Softcopy	5 tahun	
Informasi yang wajib tersedia SETIAP SAAT								
3.		Ringkasan informasi <i>masterplan</i> dan <i>development plan</i> kawasan strategis	Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	Jakarta, 2015	Hardcopy	5 tahun	
4.		Ringkasan informasi <i>masterplan</i> dan <i>development plan</i> kawasan perkotaan dan perdesaan prioritas	Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	Jakarta, 2015	Hardcopy	5 tahun	

NO	UNIT ORGANISASI	PERIHAL	UNIT YANG MENGUASAI INFORMASI	UNIT PEMBUATAN/ PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN	FORMAT INFORMASI	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN	KET/ KODE
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
KHUSUS								
XII.	BADAN PENGATUR JALAN TOL							
	Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan SECARA BERKALA							
1.	BADAN PENGATUR JALAN TOL (BPJT)	Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyelenggaraan jalan tol	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Bidang Operasi dan Pemeliharaan	Setiap Semester, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	
2.		Progres konstruksi jalan tol	Bidang Teknik	Bidang Teknik	Per Bulan, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	
3.		Status Jalan Tol dalam persiapan tender, proses tender, sudah tanda tangan PPJT, sudah beroperasi)	Bidang Investasi	Bidang Investasi	Setiap Update, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	
4.		Info tarif tol dan golongan kendaraan	Bidang Investasi	Bidang Investasi	Setiap Update, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	
5.		Peluang investasi jalan tol	Bidang Investasi	Bidang Investasi	Setiap Tahun, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	
6.		Informasi yang Wajib Tersedia SETIAP SAAT						
		Daftar ruas jalan tol berikut Badan Usaha Jalan Tol (BPJT)	Bidang Investasi	Bidang Investasi	Setiap Update, Jakarta	Softcopy dan hardcopy	1 Tahun	

